



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-02.HN.03.05 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK TAHUN 2021**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penghargaan kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dan melakukan inovasi di dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada institusinya;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dan verifikasi atas laman (*website*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan dokumen laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Tahun 2020, telah tersusun Daftar Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK TAHUN 2021.**

- KESATU : Menetapkan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2021 untuk kinerja pengelolaan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan dan hasil evaluasi atas 7 (tujuh) aspek yang meliputi:
1. Organisasi;
  2. Sumber Daya Manusia;
  3. Koleksi Dokumen Hukum;
  4. Teknis Pengelolaan;
  5. Sarana Prasarana;
  6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  7. Inovasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada setiap penerima penghargaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Kerja terkait;
3. Para Pimpinan Lembaga Negara terkait;
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian terkait;
5. Para Pimpinan Lembaga Non-Struktural terkait;
6. Para Gubernur terkait;
7. Para Bupati terkait;
8. Para Walikota terkait;
9. Para Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota terkait;
10. Para Rektor Universitas terkait.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR : M.HH-02.HN.03.05 TAHUN 2021  
TANGGAL : 02 Desember 2021

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK  
TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>PENERIMA PENGHARGAAN / UNIT KERJA</b>	<b>PERINGKAT</b>
<b>Tingkat Kementerian</b>		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Terbaik I
2.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terbaik II
3.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terbaik III
4.	Kementerian Ketenagakerjaan	Terbaik IV
5.	Kementerian Keuangan	Terbaik V
<b>Tingkat Lembaga Negara</b>		
1.	Badan Pemeriksa Keuangan	Terbaik I
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	Terbaik II
3.	Dewan Perwakilan Daerah	Terbaik III
4.	Ombudsman Republik Indonesia	Terbaik IV
5.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Terbaik V
<b>Tingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian</b>		
1.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Terbaik I
2.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Terbaik II
3.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Terbaik III
4.	Radio Republik Indonesia	Terbaik IV
5.	Arsip Nasional Republik Indonesia	Terbaik V
<b>Tingkat Lembaga Non-Struktural</b>		
1.	Komisi Pemilihan Umum	Terbaik I
2.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Terbaik II
3.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Terbaik III
4.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	Terbaik IV
5.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Terbaik V
<b>Tingkat Provinsi</b>		
1.	Provinsi Jawa Barat	Terbaik I
2.	Provinsi Jawa Tengah	Terbaik II
3.	Provinsi Jawa Timur	Terbaik III
4.	Provinsi Bali	Terbaik IV
5.	Provinsi Sulawesi Barat	Terbaik V
<b>Tingkat Kabupaten</b>		
1.	Kabupaten Banyuwangi	Terbaik I
2.	Kabupaten Sukoharjo	Terbaik II
3.	Kabupaten Batang	Terbaik III

4.	Kabupaten Sumedang	Terbaik IV
5.	Kabupaten Wonosobo	Terbaik V
6.	Kabupaten Sleman	Terbaik VI
7.	Kabupaten Tuban	Terbaik VII
8.	Kabupaten Cianjur	Terbaik VIII
9.	Kabupaten Kendal	Terbaik IX
10.	Kabupaten Semarang	Terbaik X
<b>Tingkat Kota</b>		
1.	Kota Sukabumi	Terbaik I
2.	Kota Banjarmasin	Terbaik II
3.	Kota Surakarta	Terbaik III
4.	Kota Bandung	Terbaik IV
5.	Kota Bekasi	Terbaik V
<b>Tingkat Sekretariat DPRD Provinsi</b>		
1.	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Terbaik I
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Terbaik II
<b>Tingkat Sekretariat DPRD Kabupaten</b>		
1.	Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	Terbaik I
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang	Terbaik II
<b>Tingkat Sekretariat DPRD Kota</b>		
1.	Sekretariat DPRD Kota Batam	Terbaik I
2.	Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan	Terbaik II
<b>Tingkat Perpustakaan Hukum</b>		
1.	Universitas Bandar Lampung	Terbaik I
2.	Universitas Pamulang	Terbaik II
3.	Universitas Sam Ratulangi	Terbaik III

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
YASONNA H. LAOLY

